



Neoliberalisme dan Bisnis Pendidikan

“Kita tahu, bahwa engkau gila karena terlalu banyak belajar”

—Petronius (66M) *Satyricon*, Chapter XLVI



konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga nilai-nilai kebangsaan, dan menjaga moral. Kritik-kritik ditanggapi cepat. Sekjen Depdiknas, Dodi Nandika menyatakan bahwa “dalam Perpres itu hanya politeknik yang boleh dimasuki, itupun dibatasi bidang, lokasi, dan batasan kepemilikan modal”. Tentu saja, seperti sebagian besar pernyataan juru bicara pemerintah, pernyataan ini hanya dusta. Dalam Perpres No. 77 tahun 2007, baik di antara pasal-pasal maupun lampirannya, tidak satu kata pun menyebut-nyebut soal ‘hanya politeknik’. Dalam Perpres, hanya disebut bidang pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan tinggi. Itu saja, tiada yang tambahan. Artinya, pemodal bisa menanamkan kapitalnya dalam kegiatan usaha pendidikan di semua jenjang dengan batas tertinggi kepemilikan asing 49% saham.

Dikeluarkannya Perpres No. 77 tersebut sebenarnya hanya pertanda kecil bahwa agenda neoliberal sudah begitu matang memasuki kebijakan ekonomi dan politik di Indonesia. Tentu saja bukan SBY sendiri yang menyusun Perpres tersebut, tapi para staf ahli berpendidikan tinggi yang pernah mendapat beasiswa bersekolah ke luar negeri. Boleh dikata bahwa sebagai agen-agen ideologi neoliberalisme, mereka berhasil dengan baik, entah disadari atau pun tidak. Perpres No. 77 adalah bola salju kecil. Kini ia sedang menggelinding dan tak sampai 25 tahun ke depan bola itu akan melabrak semua penghalang perluasan cengkaman kapital ke semua sektor kehidupan.

Sebenarnya, paling tidak sejak 150 tahun lalu, pendidikan dan kesehatan adalah salah satu sektor publik yang diyakini sebagai bekal terpenting negara-bangsa. Anthony Giddens menyebutnya investasi sosial. Pendidikan sekolah adalah lahan investasi negara untuk memperkuat diri menghadapi persaingan ekonomi antarbangsa. Kedudukan ini diperkuat pasca Perang Dunia I ketika ekonomi Keynesian menjadi panduan kebijakan negara kesejahteraan. Negara yang dipandang sebagai ‘korporasi’ tersendiri musti menginvestasikan kapitalnya ke dalam sektor-sektor yang menjadi tonggak persaingan antarnegara di tataran dunia dan tidak mungkin digerakkan oleh pasar. Sampai saat ini pun tingkat pendidikan merupakan salah satu pertanda tingkat kemajuan ekonomi suatu negara.

Namun, perubahan mulai terasa setelah usainya Perang Dunia II. Perlahan namun pasti, ekonomi Keynes dan negara

kesejahteraannya digugat oleh sebarisan ideolog yang dikemudian hari dikenal nama neoliberalisme. Gugatan ini memuncak ketika terjadi krisis kapitalisme dasawarsa 1970-an yang memperkuat anggapan neoliberal tentang bahaya penguasaan negara atas pasar. Untuk keluar krisis, negara musti lepas tangan dari semua sektor kehidupan dan membiarkan pasar bekerja sebagai satu-satunya panduan.

Neoliberalisme adalah gejala global. Ciri-cirinya meliputi: 1) deregulasi ekonomi, 2) liberalisasi perdagangan, 3) pelepasan semua sektor publik (pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial) ke pasar, dan 4) dominasi sektor keuangan (saham, obligasi, dkk.) atas sektor produksi dan perniagaan. Neoliberalisme merupakan tanggapan atas krisis kapitalisme. Kemandegan akumulasi kapital, menurut para ahli ekonomi politik, disebabkan terjadinya penurunan rata-rata keuntungan karena overproduksi. Oleh sebab itu, jalan keluarnya adalah memperluas ekspansi kapital, baik secara geografis maupun secara sektoral. Sekarang perluasan secara geografis boleh dikata sudah semakin sempit kemungkinannya. Sejak masa penjajahan modern atas dunia, seluruh dunia sudah dirambah kapitalisme. Karena itulah perluasan yang paling mungkin adalah sektor. Sampai sekarang beberapa sektor masih dipertahankan untuk tidak dimasuki kapitalis. Kebijakan ini merupakan sisa terakhir pandangan ekonomi Keynes dalam ilmu ekonomi. Kebijakan inilah yang disasar agenda neoliberal untuk dihapuskan dari muka bumi. Upaya itu pertama-tama digerakkan oleh WTO yang mencantumkan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial sebagai sektor bisnis tersier.

Di sektor pendidikan, gagasan pokok neoliberalisme terletak pada pandangan bahwa pendidikan sekolah akan lebih efisien dan efektif bila diserahkan ke pasar dan bukannya ditangani sebagai layanan kebutuhan publik yang dibiayai negara. Layanan pendidikan adalah komoditi dan oleh karena itu pengaturan pemerintah haruslah sesedikit mungkin.

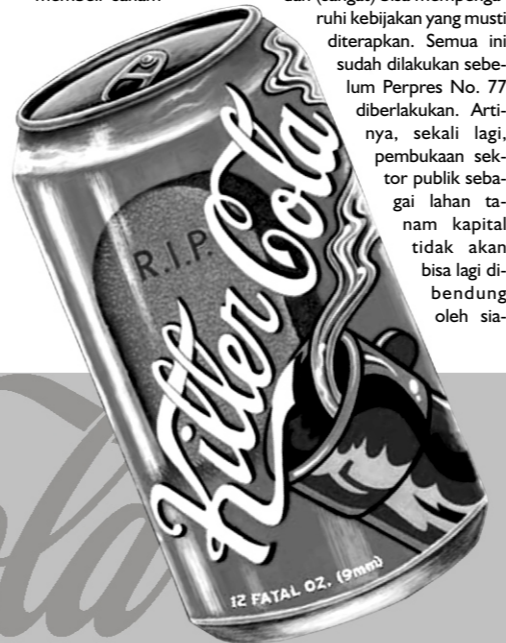
Dari berbagai kasus perombakan sistem pendidikan sekolah, paling tidak ada 3 model pendidikan sekolah yang diajukan agenda neoliberal, yaitu 1) pengadaan pendidikan musti murah. Caranya adalah menjadikan produknya, yaitu layanan pendidikan, sebagai komoditi. Layanan pendidikan bukan lagi amal pemerintah dan produksinya musti menghasilkan keuntungan; 2) pendidikan dipermudah dan dibakukan penilaian hasilnya dengan menggiatkan test-test pilihan ganda yang bisa diterapkan di mana pun dan kapan pun; 3) pendidikan sekolah difokuskan pada keterampilan-keterampilan yang bisa dijual di pasar

tenaga kerja. Dampak dari 3 model pendidikan menurut agen neoliberal ini, seperti yang disaksikan di Indonesia, meliputi 1) pemotongan anggaran pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan, 2) penutupan program-program yang tidak efisien dan tidak secara langsung terkait dengan kebutuhan bisnis untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai, 3) wacana dan praktik pendidikan sekolah betul-betul sepenuhnya sebagai bisnis dan pertama-tama (harus) mengabdikan kepada bisnis.

II

Gambaran agenda neoliberal di tingkat mikro di Indonesia sudah mulai menunjukkan geliatnya pasca 1998. Secara nasional, sejak 1998 agenda-agenda politik dan ekonomi menunjukkan kecenderungan mengikuti resep-resep neoliberal. Dengan alasan untuk melunasi hutang kepada lembaga-lembaga peminjam internasional (IMF, ADB, WB), pemerintah berturut-turut mengurangi anggaran pengeluaran untuk subsidi. Sektor-sektor yang paling terasa adalah bahan bakar minyak, kesehatan, dan pendidikan. Sebagian badan usaha milik negara dijual kepemilikan sahamnya kepada kapitalis. Semuanya dilakukan untuk membayar hutang. Nyatanya, hutang bukanlah tujuan pokok pengurangan anggaran pengeluaran. Hutang hanya cara agar agenda neoliberal yang digerakkan IMF dkk terlaksana.

Di dunia pendidikan, semua perguruan tinggi negeri ditekan sedemikian rupa untuk mengubah dirinya menjadi perusahaan. Pemerintah mengurangi secara bertahap keterlibatannya dalam membiayai pendidikan. Sebagai perusahaan, dalam sunnan kepemilikan saham perguruan tinggi pemerintah hanya salah satu pemegang sahamnya saja. Selebihnya, kapitalis bisa membeli saham



(sangat) bisa mempengaruhi kebijakan yang musti diterapkan. Semua ini sudah dilakukan sebelum Perpres No. 77 diberlakukan. Artinya, sekali lagi, pembukaan sektor publik sebagai lahan tanam kapital tidak akan bisa lagi dibendung oleh sia-

pa pun. Tampilan ini merupakan ciri asli kapitalisme dan Forum Rektor Indonesia bukan tandangnya.

Dapat dikatakan bahwa pendidikan sekolah tampil di bawah kapitalisme dalam dua sisinya. *Pertama*, lembaga pendidikan sebagai agen sosialisasi nilai-nilai kapitalisme dan penghasil tenaga kerja dalam kaitannya dengan reproduksi kondisi produksi sistem kapitalis. Sebagai produsen tenaga kerja, lembaga pendidikan tentu saja tidak sekadar menghasilkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar (dunia kerja), tapi juga pekerja yang cara pikir dan cara tindakannya sesuai dengan cita-cita luhur kapitalisme untuk menjadikan kehidupan manusia sebagai komoditi yang terukur segala-galanya berdasarkan nilai tukarnya.

Sekolah-sekolah adalah pabrik disiplin. Disiplin ini dibutuhkan tidak hanya untuk menggerakkan mesin ekonomi kapitalis, tapi juga menyebarkan kesadaran bahwa sistem ekonomi yang berjalan saat ini adalah satu-satunya sistem ekonomi yang wajar dan masuk akal. Bila sebelumnya pendidikan sekolah diabdikan untuk kepentingan negara bangsa (sebagai perusahaan) seperti mengajarkan patriotisme, nilai-nilai luhur bangsa (American Dream, American Way), dan kepatuhan pada tradisi, maka sekarang, di tangan agenda neoliberal, pendidikan sekolah diabdikan demi nilai-nilai kapitalisme. Dampaknya adalah perluasan gejala keterasingan diri individu karena dalam sistem kapitalisme individu tiada lain adalah bagian dari mesin produksi komoditi untuk mencapai akumulasi dan perluasan kekuasaan kapital. Manusia menjadi setara derajatnya dengan traktor tangan atau truk.

Kedua, pendidikan sebagai sektor penanaman dan akumulasi kapital. Tujuan paling mulianya adalah menghasilkan laba bagi kapitalis. Tujuan di luar tujuan mulia ini seperti mencerdaskan kehidupan bangsa atau menaikkan martabat manusia, hanya sampingan. Tujuan mulia ini merupakan satu-satunya panduan kebijakan pendidikan. Prinsip dasar dalam ekonomi kapitalis, yaitu biaya semurah-murahnya untuk keuntungan sebesar-besarnya berujung pada keadaan yang memaksa lembaga-lembaga pendidikan mempercepat dan mempraktikkan pembelajaran. Hal ini tampak pada perombakan kurikulum di tingkat mikro yang cenderung menysihkan pelajaran-pelajaran yang tidak menjual. Beberapa program studi yang tidak begitu dibutuhkan pasar ditutup dan program-program studi baru yang terkait langsung dengan pencetakan pekerja dibuka ramai-ramai. Selain itu, sebagai perusahaan, lembaga pendidikan memajukan peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi. Kecenderungan mengurangi jumlah pekerja pendidikan (guru,

dosen) dengan sistem belajar jarak jauh dan komunikasi tak-langsung lewat model e-learning sudah mulai tampak dipraktikkan di banyak lembaga pendidikan tinggi. Sekali lagi, gejala ini mempertajam derajat keterasingan manusia.

III

Selama ini, pendidikan sekolah menempatkan manusia di bawah bayang-bayang dua raksasa tonggak terpokok moda produksi kapitalisme, yaitu negara dan kapital. Perdebatan umum masih berkisar di pertanyaan: siapakah yang berhak mengelola pendidikan, negara atau pasar? Pertarungan dalam wacana dan praktik sampai saat sekarang masih soal siapa yang berhak mengelolanya. Pertarungan ini berlandaskan pada anggapan dasar bahwa pendidikan sekolah itu penting. Baik Keynesian maupun neoliberal memandang arti penting pendidikan sekolah.

Rasanya baru samar terdengar pertanyaan yang lebih radikal dan melampaui kedua kubu perdebatan tadi: perlukah pendidikan sekolah itu? Sebagian orang sepakat bahwa pendidikan sekolah itu tidak perlu dan berbahaya bagi individu. Baik yang dikelola oleh negara maupun yang dikelola perusahaan, pendidikan sekolah mengerdikan manusia dan kehidupannya. Individu hanya objek kepentingan. Individu menjadi semacam lempung yang musti dibentuk sesuai dengan kebutuhan negara atau kapital. Pendidikan sekolah menjauhkan manusia dari dirinya sendiri. Patokan nilai individu terletak pada nilai tukarnya yang didapat lewat pendidikan sekolah, bukan individu itu sendiri. Artinya, pendidikan sekolah itu penting, terutama hanya agar kapitalis dapat terus memiliki barisan kelas pekerja yang patuh dan efektif. ★



Bila sekolah tidak sama dengan penjara, pertanyakan, mengapa kami yang lulus dari sekolah sedemikian riangnya seakan kami baru saja menghirup udara kebebasan?

Bedah Kejahatan Korporasi

Pembunuhan dan Larangan Berserikat

adalah lewat slogan “Life Tastes Good” atau yang paling terbaru: “Live on the Coke side of life.” Namun tampaknya, tidak demikian dengan kehidupan para pekerja—terutama para pemimpin serikat pekerja—di beberapa pabrik pembotolan Coca-Cola di Kolombia, Amerika Selatan.

Pagi hari pada tanggal 5 Desember 1996, dua anggota pasukan paramiliter lokal mengendarai sepeda motor menuju sebuah pabrik pembotolan milik Coca-Cola di Carepa, Kolombia Utara. Tepat di pintu gerbang pabrik, mereka melepaskan sepuluh tembakan peluru ke arah seorang pekerja yang bernama Isidro Segundo Gil hingga tewas. Isidro Gil sendiri adalah anggota dewan eksekutif serikat pekerja, dan anggota dari Sinaltrainal, yaitu serikat pekerja industri makanan nasional di Kolombia. Luis Adolfo Cardona, seorang pekerja lainnya yang sedang bekerja, menjadi saksi pembunuhan tersebut. Saat mendengar tembakan pistol dan melihat tubuh Isidro Gil ambruk, Cardona langsung berlari untuk menyelamatkannya, namun Isidro telah meninggal dunia.

Beberapa jam kemudian, beberapa anggota pasukan paramiliter mencoba menangkap Cardona. Beruntung, Cardona berhasil melarikan diri menuju kantor polisi setempat dimana ia mendapatkan perlindungan kemudian. Malam itu juga, mendekati tengah malam, sekelompok anggota pasukan paramiliter mendatangi sebuah rumah yang digunakan sebagai kantor serikat pekerja lokal, mengobrak-abrik dan membakar tempat itu. Tidak ada yang tersisa dari kantor tersebut kecuali dinding bangunan. Keesokan harinya, sepasukan paramiliter bersenjata berat kembali mendatangi pabrik dimana Isidro terbunuh. Di

sana mereka mengumpulkan sebanyak 60 pekerja, yang juga aktif dalam serikat pekerja, dan mengancam mereka untuk segera menandatangani surat pengunduran diri dari serikat yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh manajer pabrik. Pasukan paramiliter menyampaikan ancamannya, kalau surat-surat tersebut belum juga ditandatangani sebelum pukul empat sore, maka ke-60 pekerja itupun akan dibunuh. Berkat ancaman tersebut, ke-60 aktivis serikat menandatangani surat pengunduran dirinya dari serikat, sementara sebagian dari mereka bahkan mengundurkan diri dari perusahaan dan berpindah kota.

Selama dua bulan berikutnya, pasukan paramiliter mendirikan posko-posko penjagaan di sekitar pabrik-pabrik pembotolan Coca-Cola. Serikat pekerja di setiap pabrik pembotolan berhasil dihancurkan kemudian. Coca-Cola juga membatalkan kontrak kerja atas para pekerjanya dan melakukan pemecatan atas hampir seluruh pekerjanya, termasuk mereka yang tidak pernah terlibat dalam aktivitas serikat pekerja. Para pekerja berpengalaman yang sebelumnya diberi upah sebesar sekitar \$380 per bulan, digantikan dengan pekerja-pekerja baru dengan upah baru yang berkisar sebesar \$130 per bulan.

Pasukan paramiliter sewaan Coca-Cola adalah angkatan sayap-kanan yang penuh dengan kekerasan, gabungan dari para tentara dan tukang pukul bayaran. Coca-Cola menugasi mereka untuk “melindungi” para pekerja pabrik dari kelompok-kelompok sayap-kiri militan yang mungkin saja menganggap bahwa pabrik-pabrik tersebut merupakan simbol dari globalisasi.

Sinaltrainal menyatakan bahwa setidaknya ada sebanyak 8 aktivis serikat pekerja pabrik-pabrik pembotolan Coca-Cola di

Kolombia yang dibunuh oleh pasukan paramiliter sejak tahun 1989 (lihat box “Korban pembunuhan Coca-Cola”). Coca-Cola memperkerjakan pasukan paramiliter sebagai perwakilan dari korporasi tersebut untuk menjalankan bisnis di Kolombia.

Isidro Segundo Gil yang berumur 27 tahun, sudah bekerja di pabrik tersebut selama 8 tahun. Istrinya, Alcira Gil, meminta pertanggungjawaban Coca-Cola atas kematian suaminya. Namun apa yang didapat oleh Alcira Gil jauh dari memuaskan. Pada tahun 2000, ia dibunuh oleh pasukan paramiliter, meninggalkan kedua anak gadisnya menjadi yatim-piatu.

Miami, AS pada bulan Juli 2001. Sinaltrainal sebagai representasi para buruh pembotolan Coca-Cola di Kolombia bersama-sama dengan sebuah organisasi advokasi asal Washington DC The International Labor Rights Fund (ILRF), United Steelworkers of America, keluarga Isidro Gil dan 5 orang pekerja yang pernah mengalami penulisan dan penyiaksaan, mengajukan gugatan terhadap Coca-Cola dan perusahaan pembotolan Coca-Cola di Kolombia: Panamerican Beverages, atas kematian Isidro Gil. Mereka juga menuntut pertanggungjawaban atas kekerasan yang terjadi di pabrik-pabrik pembotolan di Kolombia yang melibatkan kekuatan paramiliter dalam pabrik untuk secara sistematis melakukan intimidasi, penulisan, penahanan dan pembunuhan terhadap para pekerja yang beraktivitas dalam serikat pekerja. Tentu saja Coca-Cola menyangkalnya.

Para hakim pun berpendapat, bahwa tidak ada satu tuntutan pun yang dapat memberatkan Coca-Cola atas terbunuhnya Isidro Gil beserta ketujuh aktivis lainnya dan berbagai praktik kekerasan di pabrik-pabrik pembotolan. Pada akhir Maret

2003, semua tuntutan yang dijatuhkan kepada para tersangka pun akhirnya dicabut oleh hakim yang berwenang dengan berbagai alasan seperti: pembunuhan tersebut tidak terjadi di Amerika Serikat dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan Coca-Cola yang berada di Atlanta.

Seorang hakim federal bernama Jose E. Martinez mengizinkan agar perkara ini dilanjutkan terhadap dua perusahaan pembotolan milik Coca-Cola di Kolombia: Fems dan Panamerican Beverages, tapi bukan terhadap Coca-Cola (Company) secara langsung. Namun, pada 4 September 2006, Jose E. Martinez membebaskan kedua perusahaan tersebut dari semua tuntutan.

Javier Correa, presiden Sinaltrainal sempat menyatakan: “Kami inginkan keadilan. Kami ingin agar orang-orang mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi dengan para pekerja Coca-Cola di Kolombia. Sekarang kau sudah mengetahuinya, maukah kau membantu kami?”

Hingga hari ini, Sinaltrainal masih melanjutkan perjuangan mereka lewat kampanye “Killer Coke”-nya (www.killercoke.org) dan menyerukan aksi pemboikotan global atas Coca-Cola.

Bukan hanya di Kolombia, pembunuhan, intimidasi dan pemberangusan atas para aktivis serikat pekerja juga terjadi di pabrik-pabrik pembotolan Coca-Cola di Pakistan, India dan Guatemala. Pembunuhan atas para pekerja dalam pabrik-pabrik pembotolan Coca-Cola di Kolombia adalah sebuah contoh kecil dari praktik kekerasan anti-serikat pekerja di negara tersebut. Sejak tahun 1986, sebanyak lebih dari 3.800 anggota serikat di Kolombia terbunuh, menjadikan negara tersebut sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dunia untuk berorganisasi.

Seharusnya kita semua dapat belajar dari banyak kasus yang terjadi di sepanjang sejarah, bahwa hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan Kapital serta sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Seperti korporasi multinasional lainnya yang memegang kendali atas pemerintahan sebuah negara, Coca-Cola bertujuan untuk memegang kendali sepenuhnya atas manufaktur serta distribusi produknya ke seluruh penjuru dunia dan mengumpulkan keuntungannya, tapi menolak untuk bertanggung jawab atas setiap dampak yang ditimbulkannya.

kannya. Kalaupun ada bukti bahwa perusahaan bertindak di luar “hukum”, maka seperti biasa alasan yang digunakan adalah: “Itu adalah tindakan oknum, bukan kami.” ★

BEBERAPA KORBAN KEJAHATAN COCA-COLA

Di bawah ini adalah daftar dari para pekerja di pabrik-pabrik pembotolan Coca-Cola di Kolombia yang dengan sengaja dibunuh sejak tahun 1989. Terdapat lebih banyak lagi pekerja Coca-Cola beserta para anggota keluarganya yang menjadi korban penculikan, penahanan secara ilegal, serta penyiksaan yang dilakukan oleh pasukan paramiliter sewaan Coca-Cola.

Tanggal	Nama	Pabrik
1989	Avelino Chicanoy	Pasto
4/8/94	José Eleazar Manco David	Carepa
4/20/94	Luis Enrique Giraldo Arango	Carepa
4/23/95	Luis Enrique Gomez Granado	Carepa
12/5/96	Isidro Segundo Gil	Carepa
12/26/96	José Librado Herrera Osorio	Carepa
6/21/01	Oscar Dario Soto Polo	Monteria
8/31/02	Adolfo Munera Lopez	Baranquilla

UPDATE: Kesemua korban pembunuhan yang tertulis di atas merupakan para petinggi serikat pekerja kecuali José Librado Herrera Osorio dari Carepa, seorang manager pabrik yang bisa dibilang bersikap cukup bersahabat dengan serikat buruh. Pada tanggal 22 Agustus 2003, seorang pekerja dari pabrik pembotolan Coca-Cola di Barrancabermeja, yang juga merupakan salah satu penuntut Coca-Cola dalam pengadilan, berhasil menyelamatkan diri dari percobaan pembunuhan. 10 September 2003, David Jose Carranza Calle (15 tahun), anak dari seorang pekerja di pabrik Barranquilla bernama Limberto Carranza, ditarik dari atas sepedanya dan dimasukkan ke dalam truk oleh sekelompok orang bertopeng. Selama kurang lebih empat jam, David ditawan dan dimintai keterangan mengenai ayahnya. Pada saat itu Ayah David (Limberto Carranza) menjabat sebagai ketua Asyahl Sinaltrainal.